

JURISDICTION COLLECTIVE ACTION FORUM, DIALOGUE #14

**EAST INDONESIA INVESTMENT DIALOGUE VOL. 001
PORTFOLIO YURISDIKSI KOMODITAS
KAKAO & BAMBU UNTUK EKONOMI
TANGGUH BENCANA**

Sabtu, 1 Oktober 2022, 15.00 - 16.30 (GMT+7)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, yang kemudian diperparah dengan adanya pandemi Covid-19. Oleh karena itu diperlukan sebuah skema ekonomi tangguh bencana salah satunya melalui diversifikasi ekonomi. Perekonomian Bali yang mengandalkan sektor pariwisata sangat terdampak saat Pandemi Covid-19 terjadi. Peluncuran Smesco Hub Timur pada tanggal 1 Oktober 2022 dan berbasis di Bali hadir untuk menjawab dua permasalahan yaitu mendorong diversifikasi ekonomi Bali dan memperkuat Kabupaten di wilayah timur secara khusus dalam penguatan dan pengembangan produk UMKM. Smesco Hub Timur ini akan berperan sebagai sebuah investment hub yang dilengkapi dengan SME's Investment Dashboard untuk menghubungkan UMKM dan investor.

Kabupaten Sigi yang terletak di Sulawesi Tengah merupakan salah satu kabupaten di wilayah Timur Indonesia yang memiliki potensi pengembangan komoditas kakao dan bambu. Kakao merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia berasal dari Kabupaten Sigi, Sulawesi, yang juga tercatat sebagai produsen kakao terbesar di Indonesia dengan produktivitas tertinggi yaitu 20% atau 19.224,4 ton dari total produksi kakao di Sulawesi Tengah dengan penggunaan lahan terluas yaitu 27.705 ha. Namun demikian, prestasi biji kakao Sigi masih terkendala dengan kualitas bijinya yang rendah karena kurangnya proses fermentasi.

Menurut perwakilan aliansi cocoa di Indonesia, Cocoa Sustainability Partnership (CSP), sektor kakao Indonesia menghadapi persoalan produktivitas yang rendah. Padahal sektor kakao berpotensi menciptakan peningkatan pendapatan petani kakao hingga 8 triliun rupiah per tahun dengan catatan terjadi peningkatan produktivitas. CSP merupakan salah satu mitra pembangunan yang aktif mendorong pengembangan sektor kakao yang berkelanjutan di Kabupaten Sigi. Selain CSP, mitra pembangunan lain seperti LTKL dan PISAgro juga mendukung pengembangan sektor kakao Kabupaten Sigi.

Pada bulan Mei 2021, Pemerintah Sigi, CSP, LTKL, dan PISAgro telah menandatangani Nota Kesepahaman mengenai pembangunan industri kakao berkelanjutan di Sigi. Komoditas bambu saat ini juga tengah dikembangkan oleh Sigi yang berkolaborasi dengan Yayasan Bambu Lestari melalui pengembangan Desa Wanatani Bambu dan Bronjong Bambu sebagai upaya mitigasi bencana, khususnya banjir yang beberapa kali melanda Sigi. Melalui dialog Investasi Indonesia Timur ini, Kabupaten Sigi mengundang para mitra pembangunan dan investor untuk mengembangkan potensi komoditas kakao dan bambu. Dengan dukungan para mitra, harapannya dapat menciptakan kakao Sigi yang unggul dan bernilai jual tinggi yaitu organik dan ramah lingkungan.

CONTEXT SETTING



Leonard Theosbrata

Direktur Eksekutif SMESCO

Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM (LLP-KUKM) atau Small and Medium Enterprises and Cooperatives atau yang sering disebut sebagai SMESCO Indonesia adalah sebuah lembaga yang dibentuk di bawah Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2007 dengan tugas utama membantu akses pemasaran bagi usaha kecil dan menengah Indonesia.

Selama ini, wilayah Jawa menjadi sentra perdagangan, padahal wilayah Indonesia Timur juga memiliki potensi besar namun belum termaksimalkan. Oleh karena itu Smesco Hub Timur hadir untuk menjawab gap tersebut. Smesco Hub Timur ini diharapkan dapat memajukan UMKM di Indonesia bagian Timur untuk meningkatkan produksi ekspor. ITDC Nusa Dua, Bali akan menjadi pusat Smesco Hub Timur. Bali dipilih karena lokasinya yang strategis dan menjadi gerbang perdagangan wilayah Indonesia Timur, sekaligus membangun kembali business model Bali paska pandemi dengan menciptakan diversifikasi ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada sektor pariwisata.

Dilengkapi dengan SME's Investment Dashboard, Smesco Hub Timur akan menjadi sebuah investment hub untuk semua kabupaten di wilayah Indonesia Timur yang kemudian menghubungkan UMKM dan investor sehingga produk unggulan ekspor tidak hanya berasal dari Pulau Jawa tapi juga merambah ke berbagai daerah di Indonesia bagian timur. Smesco berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Koalisi Indonesia Membumi, dan melihat Presidensi G20 menjadi momentum yang tepat untuk memperkenalkan Smesco Hub Timur kepada negara-negara anggota G20.



Tiza Mafira

Direktur Climate Policy Initiative Indonesia

Climate Policy Initiative adalah lembaga riset yang berfokus pada pendanaan perubahan iklim. Pada tahun 2020, CPI mengeluarkan sebuah laporan hasil studi mengenai kelapa sawit berkelanjutan dan diversifikasi ekonomi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Batubara merupakan komoditas andalan kabupaten baru, hingga tahun 2008 harga batubara di Berau anjlok, memaksa kabupaten ini ke komoditas kelapa sawit yang kemudian menjadi penggerak perekonomian baru bagi Kabupaten Berau. Sama halnya dengan batubara, Kabupaten Berau kini bergantung pada komoditas kelapa sawit sebagai satu-satunya penopang perekonomian kabupaten tersebut. Sementara, praktek monokultur bukan menjadi pilihan ekonomi sekaligus memiliki daya lenting yang rendah. Diperlukan diversifikasi ekonomi sebelum distorsi terjadi. Menanam kelapa sawit ditengarai paling menguntungkan dan dapat mensejahterakan para petani kecil di Berau. Namun dari hasil studi CPI, ditemukan bahwa skenario diversifikasi komoditas seperti jagung dan kakao berpotensi menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi daripada skenario monokultur kelapa sawit. Jadi, hasil studi CPI menegaskan diversifikasi komoditas lebih menguntungkan secara ekonomi dan lebih berdaya lenting.

Berdasarkan Laporan CPI Juni 2022 “Indonesia Blue Finance Landscape”, ditemukan bahwa:



UMKM mendominasi kategori enterprise Indonesia yaitu sebesar 99.99% dengan usaha mikro mencapai 64.601.000 juta dan berkontribusi 14-16% dari total ekspor Indonesia.



Pertumbuhan kredit untuk UMKM di Kepulauan Nusa Tenggara dari tahun 2017 hingga pertengahan 2021 mencapai 6.2%, lebih tinggi dari Jawa. Ini menunjukkan bahwa UMKM mulai bergeliat di Indonesia Timur.

Dalam kerangka kebijakan keuangan, OJK juga telah mengeluarkan POJK 51/2017 tentang penerapan laporan keberlanjutan yang mewajibkan sektor perbankan di Indonesia memiliki portfolio pendanaan yang mendukung perusahaan pada sektor ESG. Sejak diterbitkannya POJK ini, terdapat peningkatan tren pendanaan ESG dari tahun 2019-2021 dengan porsi pendanaan pada sektor Sosial yang lebih tinggi yaitu kepada UMKM dibandingkan dengan pendanaan pada sektor Lingkungan. Dari sini terlihat bahwa perhatian terdapat UMKM cukup tinggi dan untuk itu penting mendorong pertumbuhan UMKM karena berkontribusi pada perekonomian Indonesia yang lebih berdaya lenting.

PANELIS



Samuel Yansen Pongi

Wakil Bupati Kabupaten Sigi

Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas wilayah 5.196 km², memiliki 75% tutupan hutan dengan status APL (Areal Penggunaan Lahan) sekitar 25%. Dari 75% tutupan hutan tersebut, 50% merupakan taman nasional dan hutan lindung. Kabupaten Sigi mengukuhkan komitmennya untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sigi No. 4 Tahun 2019 tentang Sigi Hijau. Kemudian dengan visi berdaya saing berbasis agribisnis, pemerintah Sigi menginisiasi program-program untuk meningkatkan peningkatan petani melalui hibah dana kepada koperasi yang sehat untuk menghidupkan kelompok-kelompok tani dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nol Persen di seputaran koperasi tersebut.

Mayoritas masyarakat Sigi bergantung pada Kakao. Produktivitas kakao tertinggi adalah 20% atau 19.224,4 ton. Dari seluruh produksi kakao di Sulawesi Tengah, Kabupaten Sigi penyumbang terbesar dengan penggunaan lahan terluas yaitu 27.705 ha. Namun kualitas biji kakao Sigi masih belum sempurna karena kurangnya proses fermentasi pasca panen. Hal ini menyebabkan rasa kakao lebih asam. Dengan adanya dukungan dari mitra-mitra pembangunan khususnya CSP, pemerintah Sigi berharap dapat menciptakan kakao Sigi yang unggul dan bernilai jual tinggi yaitu organik dan ramah lingkungan.

Pasca gempa bumi tahun 2018 yang mengguncang Sulawesi Tengah, struktur tanah di Sigi menjadi renggang dan rawan hujan. Oleh karena itu, pemerintah Sigi berkolaborasi dengan Yayasan Bambu Lestari dan Mercy Corps untuk mengembangkan Desa Wanatani Bambu dan Bronjong Bambu sebagai upaya mitigasi bencana.



Sumber: antaranews.com

Selain itu, pemerintah Sigi telah menggagas program Kartu Sigi Masagena dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sigi khususnya masyarakat prasejahtera. Program Kartu Sigi Masagena bertujuan untuk memberikan akses pengobatan secara gratis kepada masyarakat prasejahtera. Sedangkan KUBE sendiri merupakan upaya pemerintah Sigi untuk memberdayakan masyarakat melalui pemberian bantuan modal maupun peralatan.

Sebagai salah satu anggota Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), Kabupaten Sigi akan menjadi tuan rumah Festival Lestari 2023 dimana mitra pembangunan dapat menyaksikan bagaimana pembangunan hijau di Sigi diimplementasikan secara gotong royong yang dipimpin oleh Pemerintah Daerah, didukung swasta dan seluruh masyarakatnya.



Wahyu

Direktur Eksekutif Cocoa Sustainability Partnership

Kakao merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia. Kebutuhan biji kakao oleh industri dan UMKM untuk ekspor dan dalam negeri cukup tinggi dan belum sepenuhnya terpenuhi dari produksi dalam negeri. Seperti yang disampaikan Bapak Wakil Bupati sejatinya produktivitas kakao Indonesia masih rendah. Dengan peningkatan produktivitas kakao, pendapatan petani kakao berpeluang meningkat hingga 8 triliun rupiah per tahun.

Cocoa Sustainability Partnership (CSP) merupakan forum kerjasama publik-swasta yang berfokus untuk kemajuan pengembangan kakao berkelanjutan di Indonesia. Salah satu area kerja CSP adalah peningkatan produktivitas para petani kakao secara berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup petani dan sekaligus menjaga lingkungan. Hingga saat ini CSP telah membina 211.000 petani dengan luas lahan lebih dari 200.000 hektar. Walaupun produksi secara nasional mengalami penurunan, akan tetapi produksi petani binaan anggota CSP mengalami tren peningkatan dari tahun 2019 yaitu 0,68 kilo per pohon dan di tahun 2020 naik menjadi 0,77 kilogram per pohon dan di 2021 yaitu 0.82 kg per pohon.

CSP mendukung petani kakao melalui Paket Petani Profesional dan menciptakan ekosistem pemungkin. Keberhasilan upaya CSP terlihat dari adanya dukungan dari Kementerian Pertanian melalui alokasi pemberian subsidi pupuk kakao sebesar 211.000 ton untuk tahun 2023, 17 kali lipat dari tahun 2022 ini atau setara dengan Rp 1 triliun. Kemudian dengan dukungan dari GIZ, CSP menginisiasi akselerasi kebun entres dan kebun induk di Kabupaten Sigi dan Provinsi Sulawesi Tengah untuk program peremajaan dan rehabilitasi berupa sambung samping untuk meningkatkan produksi kakao.

Pemerintah Sigi, CSP, LTKL, dan PISAgrro telah menandatangani Nota Kesepahaman pada tanggal 31 Mei 2022 mengenai inisiatif akses pembiayaan yang tepat sasaran bagi petani kakao guna meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman kakao. Ke depannya CSP akan terlibat dalam uji coba asuransi kakao dan mengusulkan inisiatif food estate kakao di Sigi.



I Wayan Juniarta

Senior Manager Komunikasi Yayasan Bambu Lestari

Bambu merupakan spesies rumput raksasa yang memiliki kemampuan untuk menstabilkan lahan miring, menyerap air dan karbon. Oleh karena itu, bambu dapat menjadi komoditas pilihan nature-based solution untuk upaya adaptasi perubahan iklim Indonesia. Sejak tahun 1993, Yayasan Bambu Lestari (YBL) telah bekerja dengan misi membangun 1.000 desa bambu di Indonesia untuk menciptakan ekonomi restorasi yang memulihkan 8% atau 2 juta hektar lahan kritis, menyerap 16% atau setara 100 juta karbon per tahun, menciptakan 1 juta lapangan kerja dan mempekerjakan 210.000 perempuan pada posisi kunci.

Dua kunci utama pembangunan 1.000 desa dilakukan melalui program Desa Wanatani Bambu dan Industri Bambu Desa dimana perempuan atau “mama bambu” menduduki posisi kunci sebagai ujung tombak pelestarian bambu. Melalui program Desa Wanatani Bambu yang berarti menghindari praktek monokultur, areal ditanami oleh 30% bambu, 30% tanaman pangan lokal, dan 30% tanaman komoditas (kopi, coklat, cengkeh, dsb). YBL berkolaborasi dengan Sekolah Seniman Pangan dan Javara untuk mengidentifikasi tanaman lokal yang cocok untuk dibudidayakan di areal tersebut. Penanaman tanaman komoditas ini bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh keuntungan ekonomis sembari menunggu panen bambu yang baru dapat dilakukan setelah masa tanam 7 tahun. Kemudian inisiasi Rumah Produksi Bersama (RPB) di Labuan Bajo merupakan implementasi dari program Industri Bambu Desa. RPB adalah shared factory yang dapat digunakan bersama-sama oleh pelaku industri kecil/rumah tangga berbasis bambu yang nantinya akan dikelola oleh koperasi yang beranggotakan para mama bambu dan petani bambu. Pembangunan RPB ini mendapatkan dukungan dana 20 miliar dari pemerintah pusat.

Adapun capaian YBL selama tiga dekade berkarya adalah YBL telah melibatkan masyarakat di 127 desa dan mengelola program aktif di 6 provinsi (Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur) di seluruh Indonesia. Program terbesar YBL terletak di Nusa Tenggara Timur yaitu di 7 kabupaten dan di 101

desa. Pada tahun 2022, total penerima manfaat telah mencapai 3.203 orang dan mereka berperan penting dalam menyemai 2,8 juta bibit bambu dimana lebih dari 1,5 juta bibit tersebut telah ditanam pada lahan seluas kurang lebih 2.856 hektar. Lebih lanjut, telah terbit 31 peraturan pemerintah tentang desa bambu. Di Jawa Timur, YBL bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Multi Bintang untuk penanaman bambu guna melindungi daerah aliran Sungai Brantas. Berkolaborasi dengan Diageo, YBL akan menginisiasi program serupa di sepanjang daerah aliran Sungai Tukad Yeh Penet.

Lebih lanjut, YBL mendesain Rumah Lestari Bambu (RBL), sebuah hunian yang sebagian besar terbuat dari bambu laminasi yang rendah karbon, berbahan lokal dan diproduksi lokal, serta pembangunannya dapat dilakukan oleh komunitas itu sendiri. YBL akan mengadakan sayembara yang melibatkan arsitek Indonesia untuk mendesain RBL dengan biaya 60 juta rupiah. Kemudian, hasil kolaborasi dengan SPEDAGI telah menciptakan Spedagi GORo (Gotong Royong), sepeda bambu dengan harga terjangkau yang terbuat dari bambu yang ditanam oleh masyarakat Flores sebagai landasan membangun Gerakan Green Mobility di Indonesia. Peluncuran Spedagi GORo akan dilaksanakan pada acara G20 di Bali.



Sandra

Senior Manager Komunikasi PISAgro

Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture (PISAgro) adalah asosiasi yang melingkupi pemerintah dan non-pemerintah berlandaskan kemitraan multipihak dalam mendukung pertanian berkelanjutan melalui 13 komoditas. Pada tahun 2022, PISAgro meluncurkan PISAgro 2.0, dasbor baru yang berisi 113 indikator dan dilengkapi dengan tiga komponen utama yaitu Pertumbuhan, Ketahanan, dan Keberlanjutan. PISAgro 2.0 berupaya mendukung berbagai prioritas pembangunan nasional yaitu pencapaian pertumbuhan ekonomi di tahun 2024, pengurangan angka kemiskinan ekstrim menjadi nol di tahun 2024, dan pengurangan emisi gas rumah kaca sebagaimana komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris.

Sehubungan dengan komoditas kakao, PISAgro berkomitmen mendukung kemajuan sektor kakao Kabupaten Sigi melalui penandatanganan Nota Kesepahaman bersama dengan LTKL dan CSP untuk mendorong peningkatan dan penguatan komoditas kakao di Kabupaten Sigi melalui praktek perkebunan yang baik, pengembangan komoditas kakao berkelanjutan, literasi keuangan khususnya akses terhadap pembiayaan atau fasilitasi pembiayaan. Sebagaimana yang kita ketahui, salah satu kendala sektor kakao Indonesia adalah produktivitas kakao yang rendah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah terkait modal atau akses pembiayaan kepada para petani untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas serta meningkatkan pendapatan para petani.

Untuk mendukung upaya tersebut, PISAgro mengimplementasikan model Inclusive Closed-Loop, sebuah model yang mencakup proses bisnis dari hulu ke hilir dengan menempatkan petani pada posisi sentral yang terhubung dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rantai pasok. Inclusive closed-loop memiliki lima unsur kunci yaitu dukungan pemerintah, fasilitasi produksi, peningkatan sumber daya manusia, kemudahan dalam akses pasar, akses pendanaan salah satunya melalui akses kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Salah satu capaian PISAgro adalah melakukan intervensi pembiayaan pada komoditas kelapa sawit dimana salah satu anggota PISAgro memfasilitasi petani dengan institusi keuangan (bank) untuk mendapatkan akses terhadap peluang pembiayaan seperti: pembiayaan dengan bunga komersial sebesar 12-13%, bantuan dana hibah dari BPDPKS, dan KUR. Pelaksanaan inclusive closed-loop model ini telah terbukti berhasil di banyak negara untuk mendukung atau memperkuat ekosistem ketahanan pangan yang lebih berkelanjutan.

Jurisdiction Collective Action Forum (JCAF)

Jurisdiction Collective Action Forum aims to provide an open and safe environment for all parties to contribute constructively. It offers opportunities to empower the JCAF Collaborators in identifying current challenges, opportunities, and priorities in the respected Jurisdictions for scalable solutions. The JCAF approach is cost-effective and can bring wider communities, unlock investment opportunities, and to develop evidence-based publications. The forum is initiated and collectively co-created by 11 forum collaborators, which are : Cocoa Sustainability Partnership (CSP), Daemeter Consulting, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Inisiatif Dagang Hijau (IDH), IPMI Case Centre, Landscape Indonesia, Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), Indonesian Philanthropy Association (PFI), Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture (PISAGRO), Proforest, and Tropical Forest Alliance (TFA).

The Forum Objectives and Outputs

JCAF intends to catalyse shared-lessons learned from the perspective of multi-stakeholders to promote collective actions, strengthening the enabling environment, and advancing investment into jurisdiction. Highlighting challenges and opportunities to strengthen the multi-stakeholder approach, identify the common approach, and share best practices. As well as identify, demonstrate and develop evidence-based business and investment cases on best practices of collective actions, good governance, leadership, and investment to advance jurisdiction sustainability.

With the series of dialogues, the JCAF events will create greater understanding of successful strategies and common approaches that will enable stakeholders to learn, experience and jointly develop evidence-based business cases. Successfully identify policies and regulations gaps and harmonization that will require stakeholders' collaborations to jointly develop holistic policy briefs and recommendations. The dialogue is envisioned to offer a model for co-creating, collaboration, and mobilization of collective action toward a durable solution which address critical sustainability issues at a meaningful and appropriate scale whilst at the same time collectively pursuing green prosperity at the jurisdiction level and contribute toward national strategy of Low Carbon Development and Sustainable Development Goals.

Acknowledgement

JCAF Collaborators would like to express sincere gratitude to all JCAF partners, Jurisdictional Approach (JA) proponents in Southeast Asia and everyone involved in the ideation, development and finalization of the JCAF series of dialogues.

Report Writer

Erwin Widodo

Jurisdictional Consultant and Writer

Editor

Janne Siregar

Southeast Asia Program and Communication Lead

Publication Coordinator

Leonardo Fachry

Contact:

Jurisdiction Collective
Action Forum at:
jcaf.secretariat@ibcsd.or.id

©2022

Scan me :

